

**KEKUATAN POLITIK MAHASISWA
SEBAGAI *AGEN OF CHANGE*
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM SISTEM POLITIK**

Anggun Putri Fatmala dan T Heru Nurgiansah
Prodi PPKn FKIP Universitas PGRI, Yogyakarta
Email: anggunputrifatmala9@gmail.com, nurgiansah@upy.ac.id

Abstrak

Dalam kehidupan politik kontemporer, partisipasi politik merupakan alat legitimasi negara yang demokrasi. Munculnya kehidupan sosial didasari pada masyarakat tidak terlepas dari yang namanya kekuatan politik. Mengenai situasi politik yang ada di Indonesia terhadap demokrasi telah mencakup berbagai kondisi sosial yang terjadi di sejumlah masyarakat, seperti kondisi ekonomi, politik dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan dalam membuat keputusan dan mengemukakan pendapat atau menyalurkan aspirasinya terhadap kepentingannya tersebut. Di Indonesia sendiri marak adanya berita isu-isu politik yang memicu timbulnya konflik kepentingan, baik dalam hal korupsi maupun integritas dalam pelayanan publik, yang berfungsi untuk menghasut para elite politik di Indonesia. Maka dari itu, apakah dalam berita hoax tersebut memiliki keterkaitan antara unsur-unsur kepentingan politik itu sendiri, lalu timbul suatu pertanyaan, apakah dengan ditetapkannya sistem output dapat mempengaruhi kepentingan masyarakat, atau malah sebaliknya dengan memasukkan kepentingan pemerintah itu sendiri (sistem input). Dengan adanya pertanyaan ini, maka hal ini menjadi suatu persoalan dalam mahasiswa. Dan disamping itu juga apabila mahasiswa menilai dan mengetahui seorang penguasa yang terindikasi melakukan tindakan penyelewengan kekuasaan, maka mahasiswa berhak memberikan kekuatan politiknya kepada pemerintah.

Kata Kunci: *Agen Of Change* , Kebijakan Pemerintah, Sistem Politik

PENDAHULUAN

Munculnya kehidupan sosial didasari pada masyarakat tidak terlepas dari yang namanya kekuatan politik. Salah satunya adalah dalam dunia politik di Indonesia yang dimana hal ini terjadi karena masyarakat selalu beranggapan negatif, bahwa seringkali timbul kasus- kasus yang menjatuhkan kualitas politik yang ada di Indonesia, seperti adanya kasus-kasus korupsi, ujaran kebencian terhadap pemerintah politik yang mengakibatkan dalam

dunia politik yang ada di indonesia menjadi kacau.

Kemudian yang membuat Indonesia semakin terpuruk dalam dunia politik di Indonesia ini adalah pemerintah yang hanya memikirkan dirinya sendiri dari pada kepentingan masyarakatnya. Sehingga dalam anggapannya tersebut dapat memicu pertentangan antara kedua belah pihak dan bisa menimbulkan suatu permasalahan. Padahal, jika kita kaitkan antara kepentingannya tersebut dapat diartikulasikan pada

kepentingan masyarakat atau bersama, maka yang terjadi adalah hasil pikiran itu yang akan kembali ke diri kita sendiri dengan kepentingan politiknya. Dalam permasalahan itu, hampir setiap saat mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya dihimbau dengan berita tersebut melalui media massa dan media sosial. Selanjutnya banyak yang kami temukan berita mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya dihimbau dengan berita tersebut melalui media massa dan media sosial.

Selanjutnya banyak yang kami temukan berita yang beredar di media sosial itu adalah berita hoax, seperti adanya posterposter motif politik yang dibuat dalam bentuk tagar seperti adanya berita isu-isu politik yang memicu timbulnya konflik kepentingan, baik dalam hal korupsi maupun integritas dalam pelayanan publik, yang berfungsi untuk menghasut para elite politik di Indonesia.

Dengan adanya masalah ini, maka hal ini menjadi suatu persoalan dalam mahasiswa. Dan disamping itu juga apabila mahasiswa menilai dan mengetahui seorang penguasa yang terindikasi melakukan tindakan penyelewengan kekuasaan, maka mahasiswa berhak memberikan kekuatan politiknya kepada pemerintah yaitu dengan cara mengartikulasikan kepentingannya dalam sistem politik yang dijalankan kepada pemerintah dan seharusnya pemerintah memiliki kesadaran terhadap tindakan tersebut karena hal itu bisa menimbulkan kerugian dari berbagai pihak khususnya pada masyarakat yang luas.

Oleh karena itu, masalah kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan atau dilaksanakan kepada masyarakat tentunya ada proses evaluasi, seperti banyak negara-negara yang sudah maju mulai menyadari akan setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi kebijakan. Pemerintah juga dituntut untuk "memperhatikan masalah-masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pelestarian lingkungan maupun masalah hak-hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode Studi pustaka. Pengumpulan datanya penulis dapatkan dari dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Untuk menambah kredibilitas hasil penelitian penulis melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Berdasarkan penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka maka, lokasi penelitian ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan *ebook*, jurnal dan dokumen lainnya dan sekali-kali memanfaatkan perpustakaan yang ada dimasing-masing daerah dimana para peneliti berada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik dengan berdasarkan Pancasila sebagai ideologi atau dasar negaranya. Dalam konteks negara Indonesia, Indonesia juga negara yang berbentuk hukum. Dimana setiap perbuatan yang dilaksanakan selalu berkaitan dengan hukum. Selain hukum itu sendiri, Indonesia juga adalah negeri yang kental akan dunia perpolitikan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya parpol dan juga ahli politik di Indonesia. Indonesia menganut sistem politik kontemporer yang dianggap sebagai masa depan Indonesia. Semakin majunya zaman, dunia politik juga semakin keras. Setiap agen politik berusaha mewujudkan tujuannya masing-masing dibandingkan tujuan bersama. Hal itu dapat kita lihat pada realita yang terjadi hingga saat ini. Dimana para tokoh politik saling berjuang keras untuk dapat menguasai politik tersebut.

Dalam sistem politik Indonesia, mahasiswa merupakan *agent of change* dalam duni politik, dimana hal tersebut diatur dalam UU Indonesia. Mahasiswa biasanya merupakan alat perpanjangan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintahan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika peraturan yang dibuat oleh pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat, maka para mahasiswa sebagai agen perubahan akan mengajukan demonstrasi terhadap instansi pemerintahan.

Berdasarkan hasil kajian literatur dalam penelitian ini dikemukakan hasil penelitian yang dapat dilihat saat ini, bahwa para pemerintah lebih memikirkan dirinya

sendiri dibandingkan dengan rakyatnya. Pada kondisi seperti inilah para mahasiswa selaku agen of change dibutuhkan untuk mendobrak segala kebijakan yang tidak mendukung Kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun realitanya, tidak semua mahasiswa Indonesia yang ikut memperjuangkan haknya serta hak rakyat kepada pemerintahan. Tidak semua mahasiswa menyenangi politik itu sendiri. Namun, seharusnya adalah bahwa para mahasiswa harus bisa berpartisipasi dalam dunia politik itu sendiri. Itupun, tidak semua mahasiswa yang ikut demonstrasi kepada pemerintahan memahami tujuan dari demo dan apa yang akan di perjuangkan nanti. Karena mahasiswa Indonesia saat ini kurang memahami konsep politik itu dan hanya untuk pansos saja ketika melakukan demonstrasi.

Pembahasan Gerakan Aksi Mahasiswa

Gerakan mahasiswa disebut juga sebagai suara aksi massa. Aksi masa yang dimaksudkan disini yaitu ribuan mahasiswa mengikuti dan diadakan rapat umum, demonstrasi yang dilakukan untuk menyuarakan suara rakyat, adanya organisasi atau lembaga yang mengkoordinir, tidak adanya vested-interest. Selain itu gerakan aksi mahasiswa yang dilakukan tidak memiliki tujuan politik dan tidak dicampuri urusan politik.

Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa biasanya memiliki alasan-alasan tertentu. Faktor-faktor yang mendukung gerakan atau aksi tersebut antara lain :

1. Adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang membangkitkan suara dari mahasiswa.
2. Kebebasan bergerak yang semakin luas karena tidak adanya keterikatan baik dalam hal birokrasi profesi maupun "Idiologi" politik.
3. Aksi protes yang dilakukan merupakan bagian dari manifestasi dari pengabdian masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah yang dianggap tidak mensejahterakan masyarakat luas.
4. Adanya mitos angkatan '66.

Gerakan mahasiswa muncul karena adanya proses dialektika antara kondisi subyektif mahasiswa (kecerdasan, kemampuan menganalisis situasi, dan sebagainya) dan kondisi obyektif yang ada. Dialektika dalam diri mahasiswa ini bukan hanya memicu tampilnya gerakan mahasiswa tapi juga mendukung keberhasilan dalam gerakan tersebut.

Gerakan mahasiswa pertama kali yaitu pada tahun 1974 yang mana sebagai pendobrak rezim soeharto terhadap isu penyimpangan pembangunan. Gerakan mahasiswa tahun 1974 ini kemudian diidentikkan dengan Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari). Setelah sedikit mereda pasca- Malari 1974, mahasiswa kembali bergerak di tahun 1978 dengan eskalasi isu yang berbeda.

Tuntutan kondisi zaman bukan saja tentang perubahan pola gerakan, melainkan sudah menjadi

keharusan sejarah. Karena apabila kita kaji pola gerakan yang dilakukan mahasiswa selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi obyektif dilingkungan yang mengitarinya itu terjadi baik di Negara Indonesia ataupun negara lain. Apabila mahasiswa tidak melakukan perubahan atau berdiam dengan pola gerakan yang sama berarti mahasiswa telah kehilangan ciri pemuda dan mahasiswa itu sendiri yang berarti mereka telah kehilangan revolusioner sebagai pemuda ataupun mahasiswa Indonesia.

Karena suatu gerakan dapat dilihat revolusioner atau tidak bukan hanya dilihat dari cita-cita yang menjadi tujuannya tetapi juga harus dilihat dari bentuk dan pola gerakan itu. Suatu gerakan dapat disebut sebagai gerakan yang konservatif apabila sebuah gerakan yang dilakukan memiliki tujuan(cita-cita) yang hendak dicapai tetapi tidak dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada, dan gerakan yang dilakukan masih menggunakan pola-pola lama. Gerakan mahasiswa penting dilakukan karena sebuah Universitas tidaklah cukup hanya menghasilkan teknisi, atau ahli-ahli tertentu sebenarnya. Melainkan Universitas mesti menjadi pelopor, *agent of change*, dan menjadi pelopor perubahan bangsa.

Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Sosial

Sebagai *Agent of change* status mahasiswa dan gerakannya begitu penting, karena di Indonesia sendiri tekanan politik extra parlementer penting dilakukan sebagai salah satu jalan efektif

untuk mengontrol penguasa. Namun, untuk mewujudkan perubahan aksi dari mahasiswa bukanlah satu-satunya ada elemen lain yang dapat mendobrak kevakuman perlawanan terhadap pemerintah. Suatu gerakan mahasiswa akan menyerahkan kelanjutan proses setelah pemerintah yang didobrak turun kepada elemen masyarakat lain untuk melanjutkan. Hal ini didasari oleh perjuangan moral yang walaupun masih berada pada wilayah politik. Reformasi di Indonesia tercapai oleh adanya moralitas. Agar tercapai masyarakat yang demokratis gerakan mahasiswa, cita-cita reformasi penting dilakukan dan turut memiliki andil dalam hal tersebut.

Dalam mewujudkan peranannya gerakan mahasiswa sendiri memiliki beberapa tantangan antara lain yaitu :

1. Adanya implikasi dari Negara-negara industri maju soal globalisasi ekonomi, politik dan budaya.
2. Dalam proses demokratisasi dihadapkan pada tantangan yang menyangkut segi ekonomi, politik dan sosio-kultural.

Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan tersebut gerakan mahasiswa yang dilakukan perlu berlandaskan cita-cita dan tujuan bangsa bersama. Cita-cita yang diharapkan disini tentunya cita-cita yang dapat merangkul kepentingan bersama dalam hal ini yaitu kepentingan rakyat.

Tak lupa, gerakan mahasiswa yang dilakukan haruslah kombinasi dari aksi

massa dan aksi intelektual, yang mana orientasi gerakannya dibarengi dengan pembentukan opini politik yang bertujuan untuk penyadaran publik dan aksi informasi publik. Akar dari aksi mahasiswa adalah rakyat maka dari itu apapun gerakan yang dilakukan tidak boleh terlepas dari "rakyat".

Sebagai mahasiswa yang turun aksi diperlukan jaringan organisasi yang terorganisir dan pembinaan. Namun organisasi yang membina atau mengkoordinir gerakan mahasiswa ini tidak boleh mengkerangkeng gerakan mahasiswa dalam ideologi masing-masing kelompok atau organisasi. Haruslah ada satu tujuan bersama yang dimana tujuannya itu membela rakyat. Karena gerakan yang terpisah-pisah dalam ideologi atau dalam hal ini terpecah akan memudahkan rezim untuk mengagalkan gerakan yang dilakukan.

Selain itu, demi menyusun barisan oposisi ekstra parlementer yang akan melawan rezim gerakan mahasiswa haruslah dapat menggandeng gerakan lain seperti gerakan buruh, profesi, petani bahkan gerakan-gerakan keagamaan sekalipun. Dengangerakan yang terarah maka setiap potensi dapat dimanfaatkan dan didayagunakan untuk mendukung perubahan sosial yang diinginkan bersama.

Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah

Mahasiswa sebagai garda terdepan memiliki peranan dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Sebagai orang yang menempati posisi terdepan

mahasiswa yang berperan dalam menentukan, mengantisipasi dan menjawab setiap permasalahan maupun perubahan sosial.

Sementara itu, satu hal yang harus diperhatikan di dalam proses politik di Indonesia dewasa ini ialah bahwa disamping sebagai katalisator situasi dan kehendak masyarakat, aktivitas politik mahasiswa dijadikan juga sebagai tolak ukur kepuasan masyarakat (Solia, Rima Arfa dan Lince Magriasti, 2020).

Pengertian kekuatan politik secara individual yang tidak lain adalah aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Dan secara kelembagaan disini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik

Miriam Budiardjo dalam Andik (2013:93). Mahasiswa dalam kekuatan politik disini diidentikkan dengan gerakan mahasiswa. Suatu kebijakan yang dibuat pemerintah mesti didalamnya berkaitan dengan kekuatan politik seperti gerakan mahasiswa itu sendiri, LSM terkait, dan partai politik.

Keterlibatan kekuatan politik yang ikut berpartisipasi aktif inilah yang justru mendukung secara cepat kebijakan public yang dibuat oleh pemerintah. Sejak 1908 gerakan mahasiswa sudah ada dan berkembang hingga saat ini. Salah satu gerakan mahasiswa yang tidak dapat dilupakan yaitu reformasi 1998. Pada akhir tahun 2019 kemarin tepatnya pada bulan

September masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kebijakan RKUHP yang dikeluarkan oleh DPR RI.

Kebijakan ini menuai beragam kritik termasuk dari para mahasiswa di Indonesia karena di dalam RKUHP ini banyak pasal-pasal karet yang mengandung banyak ambiguitas. Dalam kasus ini mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menjadi kekuatan politik yang mana nantinya akan dapat mempengaruhi kebijakan yang kontroversial tersebut (Kompasiana, 2021).

Aksi penolakan terhadap RKUHP ini dilakukan di hampir seluruh bagian Indonesia dimana seluruh mahasiswa Indonesia ikut andil didalamnya. Keikutsertaan mereka dalam gerakan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran akan kepentingan public. Dan kesadaran inilah yang menjadi modal utama kekuatan politik dari gerakan mahasiswa terhadap suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Aksi demonstrasi tahun 2019 kemarin ini sebagai bukti bahwa gerakan mahasiswa berpengaruh dalam suatu kebijakan publik, untuk kebijakan tersebut lanjut atau dihapus (tidak perlu dijalankan). Pada akhirnya gerakan mahasiswa ini berhasil dan pemerintah menunda pengesahan beberapa RUU yang ada.

Gerakan mahasiswa merupakan suatu kekuatan vocal dalam menyampaikan aspirasi rakyat agar didengar oleh petinggi public. Maka dari itu, agar terciptanya demokrasi diperlukan perbaikan dalam sistem pemerintahan saat ini, yang mana

gerakan mahasiswa sendiri bagian dari demokratisasi bangsa Indonesia itu. Demokrasi dapat dikatakan berhasil jika dilihat dari hasil gerakan mahasiswanya. Sebagai garda terdepan perubahan dan sebagai *agent of change* mahasiswa adalah yang memiliki peran aktif dalam mengontrol jalannya pemerintahan baik itu dari segi kebijakan ataupun dari oknum pemerintahan itu sendiri.

KESIMPULAN

Mahasiswa adalah orang yang sedang menjalani pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mahasiswa dalam konsep politik adalah sebagai agen perubahan atau *agent of change*. Politik mahasiswa saat ini dapat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Namun, kerap sering kali terjadi demonstrasi pada kalangan mahasiswa. Hal itu karena kebijakan yang di buat oleh pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat melainkan lebih fokus terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Mahasiswa sebagai *agent of change* harus dapat memposisikan dirinya dalam kehidupan bernegara dn bermasyarakat.

Banyak aktifitas ataupun kegiatan mahasiswa yang nyata dilihat dalam bentuk politik, antara lain adalah berbagai ormawa atau organisasi mahasiswa. Namun realitanya yang ditemukan, bahwa mahasiswa saat ini kurang antusias akan dunia perpolitikan.

Maka dari itu, Mahasiswa sebagai *agent of change* harus dapat membawa perubahan yang baik bagi mahasiswa, mahasiswa juga harus mengetahui dunia

politik karena mahasiswa adalah sebagai kekuatan politik juga, mahasiswa harus bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan tanpa perbuatan yang anarkis, pemerintah harus lebih memperhatikan kebijakan yang dibuat, apakah itu sesuai dengan kebutuhan rakyat atau tidak, Kemudian pemerintah juga harus memang benar-benar melindungi UU tentang politik mahasiswa. Berdasarkan kesimpulan diatas, harapannya mahasiswa agar tetap menjaga konsistensi perannya di dalam pemerintahan, karena peran mahasiswa sangat penting sebagai kekuatan politik, bahkan sebagai penggerak di dalam masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam berpolitik di lingkungan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107-115.
- Azwar, Azwar. 2010. Metodologi penelitian. Celaban timur UH III/548Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Azwar, Saifudin Azwar. 2010. Metodologi penelitian. celaban timur UHIII/548 Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Primadia, Windy. (2021, 28 Oktober). *Gerakan Mahasiswa*

- sebagai Bagian dari Kekuatan Politik dalam Proses Mewujudkan Negara Demokrasi.*
- Darmayadi, Andrias. Pergerakan Mahasiswa dalam Perspektif Partisipasi Politik. Skripsi. Bandung: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2015.
- Fakhri Hardianto. (2020). "Gerakan Sosial–Politik (Studi Kasus : Gerakan Sosial #2019gantipresiden)".
- Halking, H. &., (2020). Buku Ajar Pendidikan Politik. Universitas Negeri Medan: S.N.
- <https://www.kompasiana.com/windyprimadia/617acf11dfa97e116e501ed2/gerakan-sosial-gerakan-mahasiswa-sebagai-bagian-dari-kekuatan-politik-dalam-proses-mewujudkan-negara-demokrasi>. Diakses pada 23/10/2022
- Kusuma, I.G.W., Widiati, I.A.P. And Suryani, L.P. (2020), “Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat”, Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa, Vol. 1 No. 1, Pp. 164–169.
- Mustafidah, Z. (2016). Gerakan Mahasiswa Dan Kebijakan Nkk/Bkk Tahun 1978–1983. Avatara, 4 (1).
- Solia, Rima Arfa Solia dan Lince Magriasti. (2020). Partisipasi Politik Mahasiswa Universitas Negeri Padang Sebagai Bagian Dari Kekuatan Politik Dalam Mempengaruhi Kebijakan Rkuhp. JMIAP: Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik. Vol. 2 No 4.
- Sunatra, (2021). Pendidikan Politik Kewarganegaraan. Tim Lekkas Ed. Bandung: Lekkas. Surbakti, R., (2015). Memahami Ilmu Politik. Djoni Herfan Dan Adinto Fajar Ed. Jakarta: PT Grasindo.